

Kualitas Pelatihan dan Pendidikan Maritim dari Sudut Pandang Taruna dan Perwira Siswa

Agus Hadi Purwantomo^a, Rahyono^b, Dian Wahyu Hidayat^c, Rahul Sukhanna P^{d*}

^{a,b,c,d} Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

^aEmail: agushadi@pip-semarang.ac.id

^bEmail: rahyono@pip-semarang.ac.id

^cEmail: dwhidayat@pip-semarang.ac.id

^{d*}Email: rahul@pip-semarang.ac.id

ABSTRAK

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Maritim (PPM) dunia yang berada di bawah *International Maritime Organisation* (IMO) berperan penting dalam menghasilkan pelaut-pelaut yang berketerampilan dan berkompetensi yang ideal. Negara-negara berkembang, terutama Indonesia ditantang untuk mampu meningkatkan kualitas lembaga PPM dalam pengembangan kompetensinya yang berorientasi global dan didasarkan pada tingkat keunggulan yang tinggi, sehingga mampu mempertahankan daya saing industri dan mengatasi globalisasi lebih lanjut pada pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metode wawancara terstruktur. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai kualitas pendidikan dan pelatihan maritim dari perspektif pelaut di Indonesia. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa kualitas pendidikan maritim dari sudut pandang taruna dan pasis adalah masih belum sempurna dan membutuhkan perbaikan. Dibutuhkan strategi nasional yang efektif untuk pengembangan profesionalitas bagi pelatihan pengembangan kognitif dari pelaut.

Kata Kunci: PPM, peningkatan kualitas, standar kompetensi

ABSTRACT

The world Maritime Education and Training Institute (PPM) under the International Maritime Organization (IMO) plays an important role in producing ideally skilled and competent seafarers. Developing countries, especially Indonesia, are challenged to be able to improve the quality of PPM institutions in developing their competencies that are globally oriented and based on a high level of excellence, so as to be able to maintain industrial competitiveness and overcome further globalization which on economic growth in developing countries. This type of research uses descriptive research with a structured interview method. The main objective of this study is to assess the quality of maritime education and training from the perspective of seafarers in Indonesia. The study result founds that the quality of maritime education from the point of view of cadets and Pasis is it still needs improvement. An effective national strategy for professional development is needed for the cognitive development training of seafarers.

Keywords: PPM, quality improvement, competency standards

I. PENDAHULUAN

Dalam upaya memastikan pelatihan bagi pelaut yang kompeten untuk industri pelayaran internasional, IMO membentuk Konvensi In-

ternasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Penjagaan (STCW) pada tahun 1978 (Acar dan Ziarati, 2012).

Konvensi STCW 1978 sebagaimana telah diubah, menguraikan

persyaratan untuk melatih dan mendidik pelaut dan peraturan ini mengikat bagi pelaut, pelatihan maritim lembaga, pemilik kapal, dan pemerintah. Semua pihak yang menandatangani konvensi harus memastikan bahwa lembaga pelatihan maritim mereka mematuhi standar STCW yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pelaut. Dalam STCW 2010, fokusnya bergeser dari sekadar pengetahuan menjadi keterampilan praktis dan kompetensi. Akibatnya, pelaut dituntut untuk memperhatikan profesionalisme dan kompetensi dalam tugas mereka.

Negara-negara berkembang, terutama Indonesia ditantang untuk memberikan pelatihan dan pendidikan yang berkualitas daripada negara-negara maju, karena keterbatasan sumber daya. Sebuah laporan oleh Froholdt dan Hansen menyatakan bahwa para pembuat kebijakan, warga negara, dan pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab khusus untuk memastikan bahwa pendidikan dan pengembangan kompetensi berorientasi global dan didasarkan pada tingkat keunggulan yang tinggi, untuk mempertahankan daya saing industri dan mengatasi globalisasi lebih lanjut yang ada di depan karena pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang karena kekhawatiran umum tentang pengembangan berbagai kualitas dalam pendidikan dan pelatihan global. (2010: 7)

Hasil penelitian terdahulu mengenai penilaian kualitas pelayanan pendidikan menggunakan metode survei kepuasan kepada peserta diklat pembentukan di Poltepel Surabaya pada tahun 2016 menunjukkan bahwa masih perlunya perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan. (Hadiyatno dan Rahmawati, 2016)

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai kualitas pendidikan dan pelatihan maritim dari perspektif pelaut di Indonesia, dengan referensi

husus ke beberapa perguruan tinggi pelayaran niaga di Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap keilmuan nautika teknika dalam pengembangan kurikulum untuk memberikan masukan substansi baru dalam keilmuan tersebut agar dapat dilakukan pengembangan dari ilmu tersebut, serta pembaruan terkait peningkatan kompetensi para pelaut. Sehingga taraf program-program diklat keilmuannya yang sudah ada saat ini perlu disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan perusahaan pelayaran.

II. METODE

Dalam memperoleh data primer, metode penelitian kualitatif terutama digunakan untuk menyelidiki tujuan penelitian. Metode kualitatif umumnya mencari jawaban untuk pertanyaan "apa", "bagaimana" dan "mengapa" (Mikkelsen, 1995; Winchester & Rofe, 2010 dan McCusker & Gunaydin, 2015). Penelitian kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam dan deskripsi masalah, peristiwa, dan perspektif dengan peserta yang sebagian besar lebih sedikit daripada rekan kuantitatifnya. Metode kualitatif juga memungkinkan fleksibilitas, karena penyesuaian dapat dilakukan selama proses penelitian (Davis & Baulch, 2010).

Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara meliputi: (1) Metode instruksi apa yang digunakan di lembaga-lembaga PPM dan seberapa memuaskankah ini bagi pelaut?; (2) Apa dampak dan efektivitas PPM terhadap pelaut di atas kapal?; Apa masalah yang menghalangi pencapaian pelatihan dan pendidikan pelaut yang berkualitas?; (3) Apa masalah yang menghalangi pencapaian pelatihan dan pendidikan pelaut yang berkualitas?;

(4) Bagaimana pendidikan dan pelatihan kelautan di Indonesia dapat ditingkatkan dan dengan cara apa koordinasi dapat ditingkatkan di antara lembaga-lembaga di Indonesia?

Subjek penelitian ini adalah Taruna dan Perwira Siswa (Pasis) yang sedang menjalankan proses pendidikan di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang diamanatkan oleh konvensi STCW 1978 Amandemen 2010, pelaut diharapkan untuk mendapatkan pengalaman akademis dan pengalaman berlayar yang cukup sebelum mereka dapat melanjutkan ke tingkat pelatihan berikutnya. Pertama, lembaga Pendidikan dan Pelatihan Maritim (PPM) memiliki peran penting terhadap proses ini.

Penilaian metode instruksi dalam lembaga PPM diperlukan agar ada kesesuaian konvensi internasional. Hasil interviu dari seorang Perwira Siswa sebagai berikut: menurut responden, efektivitas metode instruksi di lembaga PPM belum maksimal karena masih ada perbedaan materi yang diajarkan di kampus dengan keadaan riil di atas kapal. Bilamana lembaga PPM dapat bekerja secara maksimal maka akan menghasilkan output yang berkualitas dalam hal ini pelaut yang memenuhi standar internasional serta memiliki kemampuan yang optimal. Seharusnya perusahaan pelayaran dalam negeri maupun luar negeri sebagai pengguna pelaut ini, tidak perlu lagi melakukan pengujian terhadap para pelaut tersebut tetapi perusahaan pelayaran masih belum percaya sepenuhnya kepada alumni yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang telah ditentukan sesuai dengan standar internasional. Hasil interviu dari seorang

Taruna sebagai berikut: menurut responden, lembaga PPM dalam hal ini PIP Semarang sebagai sebuah institusi layanan pendidikan dan pelatihan belum mampu memberikan apa yang responden harapkan untuk responden kerjakan di atas kapal. Penyajian materi yang cukup praktis dari para instruktur membuat responden belum optimal untuk memahami apa yang disebut sebagai pemahaman secara utuh, teoretik, dan praktis yang responden harapkan sebagai sebuah refleksi yang nantinya akan diperlukan sebagai sebuah bekal untuk bekerja di atas kapal. Responden mengharapkan adanya keselarasan antara sebuah kemampuan dan harapan dengan apa yang telah diberikan oleh lembaga PPM agar mereka mampu menyediakan sebuah konsep pelatihan yang tidak hanya sekedar memberikan teori akan tetapi mampu memberikan penjelasan secara aplikatif terkait *skill* dan kompetensi apa yang dibutuhkan oleh para perusahaan pelayaran agar responden mampu bersaing dengan para pelaut baik di tingkat nasional dan internasional.

Tanggapan dari Perwira Siswa dan Taruna menunjukkan bahwa metode instruksi tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Konvensi STCW 1978 Amandemen 2010, meskipun mungkin di permukaan ada dalam desain kurikulum lembaga PPM tertentu. Tanggapan ini mengkonfirmasi kekurangan yang terkait dengan instruksi PPM seperti yang diidentifikasi oleh Emad dan Oxford (2008). Tanggapan ini juga mengungkapkan bahwa banyak pengetahuan teori maritim yang diberikan tanpa mempertimbangkan latar belakang pendidikan pelaut dan tanpa evaluasi kesesuaian bahasa yang digunakan dalam pengajaran. Misalnya, dalam kasus pelaut pertama, tidak adanya penggunaan bahasa pengantar yang jelas dan sederhana dapat

menghambat pemahaman konsep dasar maritim. Rendahnya tingkat paparan praktis dalam pelatihan maritim juga berdampak pada kualitas pelaut. Tanggapan ini juga mengkonfirmasi bahwa sistem lembaga PPM di Indonesia berada dalam transisi dari sistem tradisional ke gradien. (Corovic, 2013). Oleh karena itu, harus diterapkan untuk memastikan bahwa metode instruksi yang terbaik dan tepat dipilih di lembaga PPM.

Kedua, lembaga PPM dan administrasi maritim perlu memastikan bahwa pelaut menerima pelatihan terbaik untuk menjalankan tugasnya dengan kompeten. Tanggapan dari Perwira Siswa dan Taruna seperti yang ditunjukkan di atas melaporkan bahwa kurikulum di lembaga PPM terdiri dari kerja teori, pelatihan praktik, dan simulasi. Hasil interviu dari Perwira siswa tentang dampak dan efektivitas lembaga PPM terhadap pelaut di atas kapal menunjukkan: menurut responden, lembaga PPM belum bekerja secara maksimal untuk menunjang keefektivitasan terhadap peserta didik. Bilamana PPM bekerja secara maksimal tentunya akan menghasilkan pelaut yang berkualitas dan berstandar internasional. Dalam hal ini, perusahaan dalam negeri maupun luar negeri tidak perlu lagi melakukan pengujian terhadap pelaut tersebut karena sudah diakui kualitas dan standarnya. Hasil interviu dari Taruna tentang dampak dan efektivitas lembaga PPM terhadap pelaut di atas kapal menunjukkan: Menurut Responden, lembaga PPM telah bekerja maksimal dalam memberikan pelatihan terhadap setiap peserta didik sehingga dapat mencetak para pelaut Indonesia yang dapat bersaing dengan pelaut asing dan dapat bekerja sesuai dengan apa yang harus dikerjakan di atas kapal. Lembaga PPM telah memberikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan yang telah ditentukan atau sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Standar yang telah

ditetapkan oleh setiap lembaga PPM yaitu standar IMO di mana standar tersebut telah digunakan oleh setiap lembaga PPM yang ada di seluruh dunia. Setiap lembaga PPM telah memberikan pelatihan dan pendidikan yang dibutuhkan setiap peserta didik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditunjukkan kepadanya. Terlepas dari belum sempurnanya sistem pada lembaga PPM diakui bahwa ketidakmampuan para pelaut untuk bersaing tidak terjadi di dunia maritim. Meskipun pelaut di beberapa negara Eropa dan Amerika Utara mungkin terlihat lebih maju dan kompeten dalam pekerjaan daripada pelaut Indonesia, mereka juga mampu bersaing dengan pelaut dari beberapa negara Asia, karena ada sistem pendidikan yang serupa. Ketiga, mengidentifikasi masalah yang menghalangi pencapaian pendidikan dan pelatihan berkualitas bagi pelaut di Indonesia dengan representasi PIP Semarang. Tenaga kerja khususnya di bidang maritim yang kompeten diperlukan jika tujuan utama IMO untuk memastikan keselamatan maritim, efisiensi navigasi, serta pencegahan dan pengendalian pencemaran laut dari kapal ingin dicapai. Amandemen Konvensi STCW 1978 tahun 2010 diadopsi tentang menyadari pentingnya menetapkan standar kompetensi wajib yang terperinci dan ketentuan wajib lainnya yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua pelaut harus dididik dan dilatih dengan benar, cukup berpengalaman, terampil dan kompeten untuk melakukan tugas pelaut dengan cara yang memberikan keselamatan hidup, kapal dan keamanan di laut serta perlindungan lingkungan laut. Pemahaman tentang tantangan diperlukan dalam membuat rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelatihan dan pendidikan pelaut. Hasil interviu dari beberapa perwira siswa menunjukkan: terdapat permasalahan yang cukup kompleks antara apa yang

menjadi hambatan untuk mengkaji hambatan yang terjadi selama mengikuti sistem lembaga PPM PIP Semarang. Hal ini antara lain responden belum menemukan antara apa yang menjadi keselarasan, antara apa yang dibutuhkan oleh para pelaut, dan perusahaan sebagai tempat yang merekrut para pelaut dengan sebuah apa yang menjadi sajian oleh lembaga PPM ini. Permasalahan tingkat kualitas yang disajikan dalam hal ini antara lain terkait kompetensi instruktur, pengalaman, dan kelengkapan dari peralatan praktik atau simulator yang disediakan oleh lembaga PPM. Hal ini menjadi kajian tersendiri terkait kurangnya jalur pelayaran untuk pelatihan yang tidak efisien, juga menjadi permasalahan tersendiri kami menganggap hal ini belum secara praktis disediakan oleh lembaga PPM. Responden juga melihat instruktur dan dosen yang kurang berpengalaman secara praktis dalam menyampaikan materi yang hanya menyajikan secara teori saja, hal ini kurang mampu memberikan sesuatu yang menantang dalam hal refleksi atau gambaran terhadap pekerjaan responden di atas kapal. Selain itu peremajaan peralatan praktik atau simulator yang kurang mampu memenuhi kebaruan dalam arti sesuatu yang *up date* sesuai dengan apa yang diharapkan oleh industri dalam hal ini perusahaan pelayaran niaga yang memiliki kebaruan teknologi yang tidak responden temukan di lembaga PPM. Hal ini menjadi perhatian yang kurang diperhatikan bagi lembaga PPM dan diharapkan institusi harus memberikan pendanaan sebagai sebuah perhatian serius untuk mengatasi hal ini. Tanggapan beberapa pelaut mengungkapkan bahwa kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas karena remunerasi yang rendah, tenaga pengajar yang kurang terlatih, dan kurangnya dana untuk perguruan tinggi pelayaran niaga menjadi masalah utama. Kurangnya jalur pelayaran nasional

untuk pelatihan praktis taruna adalah masalah utama lain yang menghambat pelatihan dan pendidikan maritim yang berkualitas di Indonesia. Pelaut dari Indonesia juga mencatat tantangan seperti akomodasi yang tidak memadai, pembiayaan, kurangnya kapal pelatihan untuk pelatihan taruna dan modernisasi peralatan praktik atau simulator. Mereka menyadari bahwa beberapa dosen sendiri bukanlah pelaut yang berkualifikasi, tidak memahami prosedur *onboard* dan tidak dapat menginstruksikan peserta didik dengan baik untuk menerapkan prosedur tersebut. Dermaga untuk pelatihan bagi taruna dan peralatan praktik atau simulator yang buruk merupakan masalah lain menurut para pelaut dari Indonesia. Untuk para pelaut yang bukan dari negara berbahasa Inggris, bahasa menjadi kendala utama. Kurangnya lembaga PPM yang mempunyai sarana dan prasarana lengkap, instruktur yang sudah senior, rendahnya tingkat pembiayaan untuk industri maritim, dan ketidakmampuan untuk menarik mantan pelaut yang berpengalaman untuk bergabung dengan lembaga PPM membahayakan kualitas pendidikan dan pelatihan berkontribusi pada proses pendidikan dan pelatihan. Wawancara tatap muka dengan peserta didik dari Indonesia sebagian besar mengungkapkan bahwa kurangnya tempat pelatihan atau magang untuk taruna di Indonesia sangat memengaruhi kualitas pelatihan dan pendidikan pelaut. Responden mengatakan bahwa selama menjabat di perguruan tinggi pelayaran niaga responden melakukan pengaturan formal dengan perusahaan pelayaran Singapura untuk menampung taruna terlatih dari Indonesia. Namun, pihak perusahaan pelayaran seringkali enggan menerima taruna dari Indonesia karena biaya akomodasi tambahan taruna untuk ikut kapal dianggap merugi karena taruna bukan aset perusahaan. Selain itu, terdapat persaingan dengan negara-

negara Asia seperti Filipina dan India di mana biaya akomodasi penerbangan pelaut relatif lebih rendah. Terakhir, mengetahui cara meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan serta pengembangan instansi maritim. Penilaian kualitas pendidikan dan pelatihan disajikan dari perspektif pelaut, tanggapan dari dosen, dan administrator PPM. Penilaian beberapa metode pengajaran di lembaga PPM di Indonesia dengan representasi PIP Semarang. Fokusnya adalah menilai kecukupan dan efektivitas metode instruksi yang digunakan di lembaga PPM. Hasil interviu kepada perwira siswa menerangkan bahwa: Sepanjang Responden mengikuti pendidikan dan pelatihan di lembaga PPM ini responden menerima banyak hal yang cukup memberikan sesuatu yang berbeda terhadap pengalaman yang telah responden dapatkan sebelumnya di kapal. Responden menyimpulkan bahwa ada sebuah kesenjangan yang terjadi antara apa yang responden peroleh di lembaga PPM ini dengan apa yang selama ini sering responden temukan sebelumnya di kapal. Responden menyarankan adanya kapal latihan yang dapat dipakai untuk latihan praktik dan simulasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai sebuah wahana untuk mengaplikasikan apa yang telah dilakukan sebelumnya dalam pembelajaran teori yang diterima di lembaga PPM. Kapal latihan yang kurang memadai akan menyebabkan Responden kurang mampu dalam pemahaman hasil pelatihan yang kami peroleh sebelumnya. Selain itu Responden juga perlu mendapatkan seorang dosen yang memang benar-benar memiliki sebuah *skill* dan kompetensi untuk menguasai substansi materi praktikum dan simulasi yang sebelumnya diberikan dalam bentuk teori. Selanjutnya penguasaan teori yang cukup optimal akan mampu memberikan sudut pandang yang mampu memberikan bekal yang kuat

ketika akan melakukan praktik dan simulasi. Di samping itu, pemerintah juga perlu memberi perhatian bagi para lembaga PPM agar mampu memberikan bantuan berupa peremajaan peralatan pendukung dan melengkapi peralatan yang dibutuhkan dalam proses praktikum dan simulasi selain itu pemerintah diharapkan mengkaji perlunya menjalin kerjasama dengan negara-negara kawasan regional untuk saling memberikan penempatan kerja bagi para pelaut sesuai *skill* dan kompetensi yang dimiliki. Para pelaut juga menambahkan bahwa perumusan kebijakan yang tepat, menjadikan pelatihan maritim sebagai bagian integral dari pembahasan dan perencanaan dan tingkat regional, merumuskan strategi untuk implementasi, dan membangun kemitraan publik-swasta dalam mengembangkan lembaga PPM akan membantu memberikan pendidikan dan pelatihan maritim yang berkualitas bagi para pelaut. Tanggapan dari administrator di Indonesia menunjukkan bahwa masalah dan tantangan dalam mencapai pelatihan dan pendidikan maritim yang berkualitas bisa serupa di sebagian besar negara Asia. Namun kesimpulan ini perlu diteliti lebih lanjut karena Asia memiliki banyak negara maritim. Penelitian tentang Implementasi Pendidikan dan Pelatihan Maritim (PPM): Eksplorasi Tantangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi yang Menghadapi PPM di Kenya oleh Nthia Josephine Mabuti (2013) mengungkapkan bahwa ada kekurangan instruktur yang berkualitas di Kenya. Menurut Mabuti (2013), analisisnya “mengakui kebutuhan untuk memperoleh instruktur yang berkualifikasi tepat untuk institusi PPM di Kenya”. Temuan ini sejalan dengan kesimpulan yang diambil dari pelaut Indonesia tentang masalah kurangnya pengalaman dosen di lembaga PPM.

Indonesia secara holistik harus mampu memanfaatkan potensi dengan baik untuk mendorong pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Hal ini dapat ditempuh melalui kepastian tenaga kerja yang kompeten di industri maritim. Lembaga pendidikan dan pelatihan maritim yang dimiliki oleh negara ini diharapkan tidak hanya mampu menjalankan standar kualitas di tingkat tinggi untuk membekali para taruna dan perwira siswa dengan keterampilan yang diperlukan dan memungkinkan para taruna dan perwira siswa memiliki suatu standar kompetensi secara internasional agar mampu menjalankan perannya dalam berkompetisi dengan semua pelaut yang ada di dunia. Studi dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah penilaian lembaga pendidikan dan pelatihan maritim di Indonesia khususnya di PIP Semarang. Sejalan dengan tujuan studi ini secara khusus meminta pendapat peserta didik tentang metode interupsi yang digunakan di lembaga PPM dan seberapa memuaskan hal ini dalam memberikan kontribusi bagi pendidikan dan pelatihan pelaut. Terungkap sebuah bukti kongkrit bahwa metode utama pengajaran di lembaga PPM Indonesia antara lain pelatihan praktis, simulasi, teori yang terkait dengan kebutuhan keterampilan yang diperlukan di kapal. Dari hasil beberapa interviu dari peneliti, peneliti menemukan bahwa teori lebih banyak diberikan daripada praktik dan simulasi. Selain itu beberapa dari informan juga menjawab bahwa mereka telah mendapatkan simulasi kapal di kapal latihan yang masih sangat minim karena perguruan tinggi pelayaran niaga rata-rata hanya memiliki 1 kapal latihan yang belum beroperasi di jalur pelayaran nasional.

Tujuan kedua studi ini secara objektif adalah untuk memahami secara holistik dampak serta efektivitas pendidikan dan pelatihan maritim terkait tugas pelaut yang akan pelaut Indonesia

kerjakan di atas kapal meskipun pelaut Indonesia berasumsi bahwa pelaut kurang dapat bersaing dengan rekan mereka dari Amerika dan Eropa, namun pelaut Indonesia berpandangan pelaut mampu bersaing di level regional yakni dengan para pelaut di benua mereka yakni beberapa negara di kawasan Asia. Tantangan utama yang dihadapi oleh para pelaut adalah bagaimana menerapkan apa yang dipelajari di lembaga PPM. Sebagian ditemukan sebuah ketidakpuasan akan paparan praktis yang didapatkan dari lembaga pelatihan tersebut.

Ketiga studi ini mencari sebuah pendapat tentang pemahaman terhadap masalah-masalah yang menghambat pencapaian pelatihan dan pendidikan pelaut yang berkualitas dari sisi *skill* dan kompetensi yang mereka peroleh pasca mereka mengikuti pelatihan, studi menemukan beberapa kendala yang menghalangi pencapaian optimalisasi pendidikan dan pelatihan yang mereka tempuh. Hambatan-hambatan tersebut antara lain kurangnya dosen di lembaga PPM yang kurang berkualitas, instruktur yang kurang terlatih, pembiayaan lembaga PPM yang tidak memadai, kurangnya peralatan modern, pelatihan berbasis simulasi yang kurang optimal, tidak adanya kapal latihan untuk praktik, dan belum adanya perampingan kurikulum akademik yang dianggap tidak efektif.

Terakhir, studi ini diharapkan mampu menemukan solusi yang konstruktif untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan maritim di Indonesia serta bagaimana secara kognitif lembaga PPM dapat berkoordinasi secara efektif memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas bagi para pelaut. Dari hasil interviu beberapa informan responden juga memberikan sebuah ungkapan bahwa pelaut percaya ada kebutuhan untuk perubahan kelembagaan PPM dan reformasi regulasi tentang pelatihan

dalam pendidikan dan pelatihan maritim. Studi ini juga mengungkapkan bahwa kerjasama diperlukan dalam perwujudan pelatihan yang berkualitas. Hal ini mengacu pada beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhasil menunjukkan bahwa Inggris dan China telah mampu membangun infrastruktur yang memadai, memiliki instruktur dan penyediaan instruktur PPM yang memenuhi syarat rekomendasi. Dilihat secara komprehensif hasil pembahasan di atas perlu adanya suatu penetapan standar kualitas yang lebih tinggi di lembaga PPM yang ada di Indonesia, hal ini diperlukan untuk pengembangan potensi maritim yang ada di Indonesia. Berangkat dari hal ini sebuah pilihan yang layak untuk mengatasi masalah pencapaian pendidikan dan pelatihan yang berkualitas harus menjadi prioritas yang dikedepankan. Untuk memulai hal ini, satu masalah krusial perlu ditekankan terhadap pengembangan transportasi maritim yang merupakan peran kolaborasi kelembagaan dalam PPM di negara tersebut.

IV. SIMPULAN

Berbagai tanggapan dari peserta pelatihan PPM responden berupaya mengkonfirmasi kemungkinan kolaborasi pada kelembagaan ini yang orientasinya demi pembangunan sektor maritim di Indonesia. Para peserta yang di wawancara di sini menggunakan perguruan tinggi pelayaran niaga sebagai contoh yang representatif. Hal ini diperlukan untuk membuat homogenitas atau keseragaman dan kredibilitas yang lebih tinggi dari kualifikasi pelaut karena berpontensi meningkat peluang kerja dan kompetensi.

Lembaga PPM dapat di tingkatkan melalui investasi yang dilakukan secara progresif dalam pemberian pelatihan maritim dan infrastruktur pendidikan melalui penyediaan teknologi modern dan kapal latih. Selain itu kurikulum dalam

pendidikan perguruan tinggi pelayaran niaga harus disederhanakan untuk memastikan bahwa metode pengajaran yang dilakukan cukup efektif dalam membekali para peserta didik untuk memenuhi pasar pelaut internasional.

Berangkat dari hal ini langkah progresif harus dilakukan melalui penciptaan sebuah implementasi pelatihan berbasis teori, praktis, dan simulasi yang memadai diberikan kepada peserta didik. Selain itu, harus ada strategi nasional yang efektif untuk pengembangan profesionalitas bagi pelatihan pengembangan kognitif dari pelaut. Sebagian besar lembaga PPM sering merancang strategi pendidikan berbasis representasi yang seharusnya mewakili keseluruhan pendidikan bagi perkembangan suatu negara. Strategi ini cukup sesuai dalam memberikan rancangan strategi program pendidikan dan pelatihan maritim nasional yang efektif yang akan membantu secara teratur terkait identifikasi dalam bidang pembangunan negara Indonesia.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Corovic, B. (2013). Supply and Demand Analysis of educated seafarers. *Annals of the Oradea University, Fascicle of management and Technological Engineering*, Issue No. 2
- Davis, P., & Baulch, B. (2010). Casting the net wide and deep: lessons learned in a mixed-methods study of poverty dynamics in rural Bangladesh. *Chronic Poverty*
- Emad, G., & Oxford, I. (2008). Rethinking Maritime Education and Training, In *Proceedings of the 16th International Maritime Lecturers' Association Conference* (pp. 91-98), Izmir, Turkey *Research Centre Working Paper*, (155).
- Froholdt, L. L. & Hansen, F. K. (2010). Maritime transport: education and competence development

- in a maritime EU.
Press4transport.
http://www.press4transport.eu/vpo/thematic_fiches.php
- Hadiyatno, D., & Rahmawati, M. (2016). Pengukuran Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Pelatihan Pada Politeknik Pelayaran Surabaya Menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). *Jurnal 7 Samudra*, 1(1), 68-78.
- Mabuti, N.J. (2013). Implementation of Maritime Education and Training (MET): An Exploration of Human and Technological Resources Challenges Facing MET in Kenya. *A Dissertation Submitted to the World Maritime University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Award of the Degree of Master of Science in Maritime Affairs, Malmo, Sweden.*
- McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015). Research using qualitative, quantitative or mixed methods and choice based on the research. *Perfusion*, 30(7), 537-542.
- Ziarati, M., Ziarati, R., and Acar, U., (2012). Harmonizing maritime education and training at sea and ashore. Retrieved from the Unification of Marine Training and Education website: http://www.unimet.pro/Publications/Papers/Harmonising_Maritime_Education_and_Training_at_Sea_and_Ashore.pdf. Retrieved on 07 January 2015